

BAB I

PENDAHULUAN

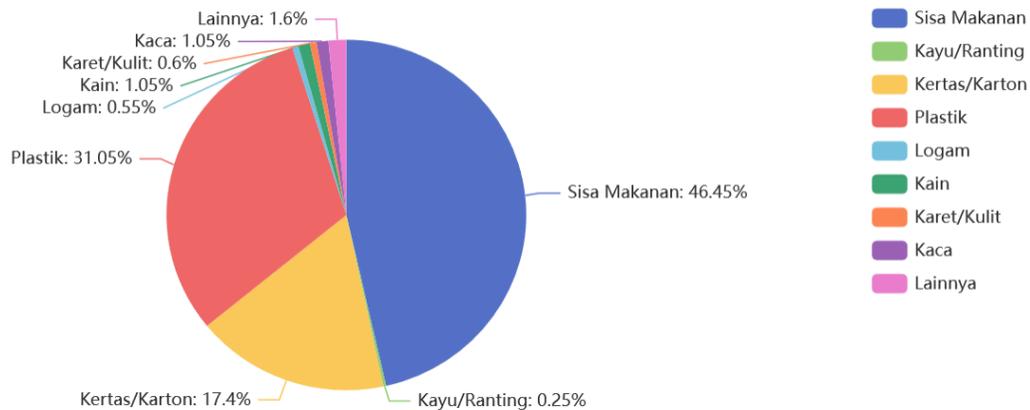
A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki masalahnya masing-masing yang bervariasi mulai dari masalah ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, hingga lingkungan. Di Indonesia, masalah lingkungan menjadi salah satu prioritas utama yang mendesak untuk ditangani (Hastuti et al., 2021). Hampir di semua kota yang ada di Indonesia mengalami kendala dalam pengelolaan sampah. Undang-undang No 18 Tahun 2018 pasal 6 menjelaskan tugas dari pemerintah, Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yang membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah, sampah suatu permasalahan lingkungan sekitar yang sangat perlu diperhatikan dengan serius (Harimurti et al., 2020).

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh berbagai kota di seluruh Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang di-kategorikan menjadi dua yaitu, jenis sampah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai, sampah anorganik atau sampah kering dan sampah organik atau sampah basah (Rania et al., 2019). Di Kota Yogyakarta, sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca memiliki sifat yang sulit terurai alami dan berpotensi menciptakan dampak lingkungan yang cukup serius. Komposisi antara sampah organik dan anorganik di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Gambar Grafik 1.1

Grafik Presentase Sampah di Kota Yogyakarta 2022



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sampah organik yang terdiri dari sisa makanan sebesar 46.45% dan 0.25% kayu/ranting. Sementara sampah anorganik paling besar dihasilkan oleh sampah plastik sebesar 31.05%, kertas/karton sebesar 17.4%, kaca sebesar 1.05%, kain sebesar 1.05%, karet/kulit 0.6% dan logam 0.55%. Berdasarkan data-data ini pengelolaan sampah anorganik yang merupakan jenis sampah dengan presentasi yang tinggi di Kota Yogyakarta menjadi fokus penelitian ini.

Sampah anorganik memiliki karakteristik yang sulit terurai secara alami, dan peningkatanya yang signifikan dalam limbah perkotaan telah mengancam ekosistem seperti tanah tidak subur, pencemaran air, dan kesehatan masyarakat (Jati, 2013). Peningkatan penggunaan produk-produk plastik sekali pakai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara benar telah memperburuk situasi ini (Yusari & Purwohandoyo, 2020). Mengingat pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah anorganik yang

di perlukan upaya pengelolaan berkelanjutan, seperti Gerakan Zero Sampah Anorganik program yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Karena kekayaan budaya dan sejarahnya, Kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata penting di Indonesia. Selain itu, dengan banyak institusi pendidikan di Yogyakarta, kota ini juga menjadi pusat pendidikan di Indonesia. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi di Kota Yogyakarta peningkatan volume sampah anorganik yang dihasilkan setiap hari. Kota Yogyakarta pada akhir-akhir ini menunjukkan fenomena yang memprihatinkan karena banyaknya sampah yang berserakan dipinggir jalan. Hal ini salah satunya, dikarenakan lokasi tempat pembuangan sampah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sementara ditutup (Hariwibowo, 2023). Sampah yang berserakan di sepanjang jalan Kota Yogyakarta banyaknya sampah rumah tangga yang menumpuk.

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dibangun pada tahun 1995 dengan luas 14,5 hektare dan masih beroperasi hingga sekarang (Eviatari et al., 2020). Volume sampah yang masuk tiap harinya terus meningkat, bahwa keadaan TPST Piyungan dipenuhi oleh sampah yang menggunung dan mengakibatkan overload. Akibat lainnya dari overload sampah adalah drainase di TPST Piyungan yang tersumbat, sebaran sampah yang sudah diluar area pembuangan, dan tumpukan sampah yang didominasi oleh tumpukan sampah daur ulang di TPST Piyungan (Eviatari et al., 2020).

Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Yogyakarta yang hampir penuh pada awal tahun 2023, pemerintah kota memulai Gerakan Zero Sampah Anorganik pada Januari 2023 (adminwarta, 2017). Tujuan dari Gerakan Zero sampah Anorganik adalah untuk mengurangi jumlah sampah anorganik

yang dibuat di dalam kota. Strategi ini dicapai melalui penggunaan sistem pengelolaan sampah yang optimal, yang mencakup pengumpulan, daur ulang, dan pengurangan sampah. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012, yang diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, menetapkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha harus mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari mereka.

Hingga Juni 2023, kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Gerakan Zero Sampah telah berhasil mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPST Piyungan. Sekitar 87 ton sampah berhasil dikelola oleh masyarakat per bulan, dengan kata lain gerakan zero sampah anorganik berhasil mengurangi 30% dari total sampah yang biasanya dibuang ke TPA (Wali & Yogyakarta, 2023). Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi masyarakat. Di Kota Yogyakarta, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan mendirikan bank sampah (adminwarta, 2017). Sampai saat ini ada 614 bank sampah di 14 kemantren dan 45 kalurahan di setiap RW Kota Yogyakarta untuk pengelolaan sampah (Warungboto, 2017).

Salah satu metode yang efektif untuk mengelola dan memisahkan sampah anorganik dan organik adalah program bank sampah. Bank sampah kegiatan memilah sampah dan dapat mengubah sampah menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta, merencanakan untuk mendirikan bank sampah 1 RW 1 pada tahun 2017. (Haryanti et al., 2020). Program ini bertujuan untuk menganalisa komposisi sampah yang masuk di bank sampah di kota Yogyakarta dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Upaya mengurangi sampah bisa menggunakan dengan prinsip 3R, meliputi Reduce (mengurangi semua yang

membuat sampah terus bertambah), Reuse (memakai kembali sampah secara langsung), dan Recycle (memanfaatkan kembali sampah yang telah diproses) (Haryanti et al., 2020).

Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH) Yogyakarta telah melakukan berbagai strategi terkait gerakan zero sampah anorganik. Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan sosialisasi teknis tentang berbagai cara pemilihan dan pengelolaan sampah. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga menyiapkan para pengelola bank sampah di masyarakat. Ketiga, selain menggerakkan masyarakat dalam gerakan zero sampah anorganik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga memperkuat pengelolaan sampah organik melalui biopori berbasis rumah tangga. Tujuan dari strategi-strategi ini adalah untuk mencapai pengurangan sampah (Warungboto, 2017).

Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengupayakan perbaikan pengelolaan sampah namun masih ada kendala. Pertama adalah kendala dalam hal sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi dari segi ini adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak bisa mengimbangi jumlah produksi sampah. Dalam hal ini terlihat bahwa pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan maksimal. Kedua adalah kendala dari segi partisipasi masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai produsen sampah dalam penerapan 3R yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle, selain itu, dalam proses pengumpulan sampah yang ada di masyarakat juga masih dilakukan secara sembarangan tanpa dipilah antar sampah anorganik dan organik (Yusari & Purwohandoyo, 2020).

Selain kendala-kendala di atas, realita di lapangan menunjukkan bahwa sinergitas masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di lingkungan masih belum optimal. Undang-undang No 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa tugas pemerintah dan

pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah anorganik memerlukan mekanisme *collaborative governance* yang melibatkan berbagai stakeholder. *Collaborative governance* adalah upaya hubungan kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak swasta, untuk menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat (Cristofoli et al., 2022).

Pada kegiatan *collaborative governance* yang terjalin kerjasama antara lembaga pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan hidup (Eka et al., 2023). Permasalahan ini dalam *collaborative governance* dibutuhkan juga peran masyarakat. Namun kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta masih minim dengan ada banyaknya titik penumpukan sampah, karena dampak dari ditutupnya dan beroperasional terbatas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, berimbas pada banyaknya sampah yang berserakan. Dengan adanya konsep *collaborative governance* yang mendukung Gerakan Zero sampah Anorganik di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan asri, dalam konsep *collaborative governance* diperlukan pendekatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat baik dari individu maupun kelompok dapat melihat secara langsung kegiatan Zero sampah anorganik dari tahap perencanaan dan evaluasi program tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta dengan konsep *collaborative governance*. Penulis melihat bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik, upaya bersama tersebut belum berjalan optimal. Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka

penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh penulis sebelumnya. Maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta dan mengidentifikasi Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta. Untuk mencapai, tujuan penelitian tersebut, penulis menetapkan tiga objektif sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Gerakan Zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi para stakeholder yang terlibat dalam Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk *collaborative governance* antara stakeholder dalam Gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, penelitian bisa meningkatkan pemahaman tentang *collaborative governance* dalam mendukung gerakan zero sampah anorganik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini di harapkan memiliki manfaat yang baik kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat, untuk menjalankan *collaborative governance* upaya dalam pengetasan sampah anorganik di Kota Yogyakarta dengan Gerakan Zero Sampah Anorganik untuk menjadi program yang berkelanjutan. Dengan adanya *collaborative governance* maka memiliki kesinambungan antar *stakeholders* dalam keterlaksanaan program dan dapat evaluasi program gerakan zero sampah anorganik yang dirasa kurang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dijelaskan tentunya memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Collaborative Governance

Definisi *collaborative governance* Gash & Ansell yang dikutip dari Firmansyah & Rahmat (2023), bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di

forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Kolaborasi yang baik adanya pembagian informasi dan pertukaran data yang transparan. Dengan adanya *collaborative governance* dapat memunculkan inovasi dalam pengurangan sampah dan praktik daur ulang dengan memanfaatkan keahlian kreativitas sebagai pemangku kepentingan.

Penelitian dari Eka et al. (2023) menunjukkan bahwa *collaborative governance* mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah. Dengan mengambil contoh kasus di Kabupaten Lamongan, penelitian ini mengislarikan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, organisasi masyarakat dan pihak swasta sehingga dapat bersinergi melakukan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian selanjutnya Avitadira & Indrawati (2023) menunjukkan bahwa sampah menyebabkan pencemaran lingkungan karena mengakibatkan turunya kualitas lingkungan hidup. Dengan mengambil Lokasi di DKI Jakarta, Penelitian ini menganalisis bahwa permasalahan sampah muncul karena kurang optimalnya pengelolaan sampah. Avita dan Indrawati mengidentifikasi bahwa pengelolaan sampah yang ada di DKI Jakarta sebagian besar tidak berkelanjutan, maka dari itu Pemerintah DKI Jakarta masih mengandalkan bentuk open dumping yang merupakan pengumpulan sampah secara terbuka. Sebagai akibatnya TPA Bantargebang yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta mengalami overload dengan kondisi yang memperhatikan.

Dalam permasalahan sampah ini Pemerintah DKI Jakarta mengharuskan menggunakan sistem *sanitary landfill* dalam jangka waktu 15 tahun. Maka pengelolaan sampah yang dilakukan TPA Bantargebang berlandaskan kontrak kerja sama antara

Pemerintah Provinsi dengan pihak swasta dan juga melibatkan pihak Pemerintah Kota Bekasi. Maka penelitian dari Avitadira & Indrawati (2023) untuk mengatasi Permasalahan sampah di DKI Jakarta diperlukanya kerjasama antara pihak dengan melakukan *collaborative governance*. Dengan adanya kolaborasi suatu upaya pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan melakukan penanggulangan permasalahan sampah di DKI Jakarta.

Dalam Penelitian Idris (2022) menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu konsep yang menggambarkan ketiga stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan adanya *collaborative governance* yang memiliki kelebihan dalam konsep *governance* yang mengalami perkembangan dan proses yang panjang. Proses ini ini terjadi selama terjadinya kerjasama antara *stakeholders*. Dalam pengelolaan sampah konsep *collaborative governance* sangat mendukung, karena memiliki dampak besar untuk masyarakat.

Collaborative governance memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan bersama (Febrian, 2016). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus melibatkan masyarakat sipil dalam perusmusan dan pengambilan keputusan, dengan adanya kolaborasi yang di mulai dari pemerintah sebagai pemangku dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang dapat mendorong keberhasilan. Hal ini selaras terhadap penelitian dari Chotimah et al. (2022), bahwa terdapat ancaman terhadap ketahanan lingkungan maritim yang ada di daerah Kepulauan Seribu adalah pencemaran sampah plastik dilaut yang mengancam ekosistem laut, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, maka adanya *collaborative governance* terjadi kolaborasi antara stakeholders baik dari pemerintah pihak swasta dan masyarakat mengatasi

permasalahan sampah plastik dilaut. Pemerintah Kepulauan Seribu telah melakukan kolaborasi baik dengan pihak Swasta seperti PT Danaone, KFC Indonesia ataupun dengan LSM seperti Divers Clean Action, Yayasan KEHATI, Komunitas Rumah Hijau, Perhimpunan Nelayan Ikan Hias dan Tanaman Hias, kelompok satwa di Pulau Kotok maupun masyarakat setempat. Dalam hal ini, kolaborasi dilakukan dalam bentuk komitmen pengurangan sampah melalui berbagai inisiatif program, monitoring, pembiayaan proyek pengelolaan sampah maupun penyediaan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah.

Praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPA piyungan, bahwasanya terdapat delapan indikator dan tiga komponen yang belum terpenuhi (Hidayanti & Efendi, 2021), yaitu komitmen terhadap tujuan, information sharing serta sumber daya manusia. Sedangkan terdapat lima indikator yang terpenuhi yaitu *trust among participans*, *governance*, akses kekuasaan, pembagian akuntabilitas, dan jenis struktur jaringan. Praktik *collaborative governance* yang dilakukan para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah TPA Piyungan dinilai masih kurang efektif. Dapat dilihat dari teori ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan secara garis sebagian besar tidak terpenuhi. Terdapat dua indikator dari teori diatas yang terpenuhi yaitu isu konflik lingkungan dan kemunculan gerakan social (Hidayanti & Efendi, 2021).

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif saat ini sangat di perlukan dalam pelayanan publik untuk membuat kebijakan publik dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya *collaborative governance* proses kolaboratif antar beberapa *stakeholder*, adanya *collaborative governance* dianggap untuk memulai, pembuatan, dan memonitoring permasalahan

yang ada di lingkungan masyarakat. Pengetahuan dasar dalam *collaborative governance* adalah kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Maka adanya hubungan kerja atas pemerintah, swasta dan masyarakat saling berhubungan untuk mencapai satu sama lainnya. Dengan adanya kolaborasi dapat menghubungkan para stakeholder untuk saling bekerja sama memikirkan solusi atas permasalahan lingkungan hidup terutama upaya dalam mengatasi permasalahan sampah anorganik di Kota Yogyakarta yang merupakan bukan tugas dari pemerintah sendiri tapi adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat yang menjadi produsen sampah itu sendiri (Avitadira & Indrawati, 2023).

Studi-studi tentang *collaborative governance* diatas telah memberikan gambaran tentang permasalahan lingkungan yang kemudian mendasari peneliti untuk memilih fokus pada satu isu pokok yaitu isu permasalahan sampah anorganik. Peneliti menganggap bahwa isu lingkungan karena sampah yang saat ini menjadi permasalahan besar bagi Kota Yogyakarta dapat dipecahkan dengan kolaborasi yang baik antar berbagai *stakeholders* dalam masyarakat, terutama antara pemerintah dengan masyarakat.

Kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada bagaimana kolaboratif governance di perkuat dengan melibatkan para stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta) dalam pengelolaan sampah anorganik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan gerakan zero sampah anorganik, Hal ini, pemerintah Kota Yogyakarta mengajak kolaborasi untuk mengelola sampah dengan dipilah yang kemudian sampah anorganik diserahkan kepada bank sampah dan bank sampah menjual kepada pengepul.

2. Pengelolaan Sampah

Untuk mengelola jumlah sampah yang terus meningkat Haryanti et al. (2020) mengatakan bahwa penerapan Program bank sampah dapat menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Untuk membantu dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, bank sampah dapat berperan dalam meningkatkan kebersihan, membuat lingkungan yang nyaman, dan bisa menjadi program yang berkelanjutan. Kawasan yang memiliki timbulnya sampah anorganik yang cukup tinggi merupakan kawasan perumahan, cagar budaya, pariwisata, dan kawasan perdagangan dan jasa (Yusari & Purwohandoyo, 2020).

Menurut Pemerintah Kota Yogyakarta adminwarta (2017) adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik yang telah dilaksanakan dari awal tahun 2023, sudah berhasil mengurangi sampah di yang dibuang ke TPA Piyungan, keberhasilan ini tidak terhindar dari partisipasi masyarakat dalam mengelola bank sampah yang sudah tersebar di setiap RW di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan destinasi wisata dan jumlah pengunjung makin meningkat di setiap tahunnya. Maka dari itu (Yusari & Purwohandoyo, 2020), perlu adanya perencanaan dan pengelolaan yang bagus untuk pengentasan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Pemerintah Kota Yogyakarta (Wali & Yogyakarta, 2023) mencari solusi dan terus meningkatkan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), Terus mengembangkan pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan masyarakat. Jika menurut Evitasari et al. (2020), bahwa penumpukan sampah yang sudah melebihi batas di TPA Piyungan perlu adanya Zero Waste menjadi salah satu cara tentang meluapnya sampah di TPA piyungan, bahwa partisipasi masyarakat juga penting dalam membentuk lingkungan yang nyaman dan asri. Sedangkan menurut Anggraini et al. (2020) zero waste yang merupakan rancangan

program dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk daur ulang sampah sehingga bisa digunakan kembali, agar sampah tidak lagi menimbulkan masalah tetapi bisa dilihat untuk potensi yang bermanfaat.

Pengelolaan sampah anorganik dapat memberdayakan masyarakat melalui kegiatan bank sampah menurut Santoso et al. (2021). Keterampilan recycle sampah anorganik adalah suatu keberhasilan program dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sampah anorganik yang dapat diolah dalam bentuk kerajinan dapat melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah daur ulang dan menjaga lingkungan hidup. Pernyataan dari penelitian Harimurti et al. (2020) bahwa pengelolaan sampah anorganik memiliki prinsip yang terus diterapkan dalam pemanfaatan sampah anorganik yaitu 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Hasil dari pengelolaan sampah anorganik berupa hiasan yang dapat digunakan kembali.

Kegiatan ini yang dilandasi pemikiran bahwa setiap masyarakat memiliki berhak atas lingkungan yang layak dan nyaman, sehingga setiap masyarakat wajib menjaga kenyamanan lingkungan (Yusari & Purwohandoyo, 2020). Prinsip pengelolaan sampah 3R sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Prinsip ini sangat cocok di terapkan di wilayah perkotaan dikarenakan keterbatasan teknologi maka harus memberdayakan masyarakat sebagai pelaku yang menghasilkan sampah. Namun, pada kenyataannya penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari yang diharapkan . Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang menjadi tombak dalam menangani sampah dilingkungan masyarakat seakan-akan hanya slogan yang tidak berdampak.

Penelitian dari Nurhasanah et al. (2022), banyaknya sampah plastik yang dibiarkan berada di jalanan, perkebunan sawit dan selokan air. Maka dari peneliti

mengadakan pelatihan pengelolaan sampah anorganik yang dilihat pemanfaatan mendaur ulang sampah anorganik bisa menunjang ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ratnaningsih et al. (2021) bahwa permasalahan sampah merupakan masalah bagi kota-kota besar. Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah, maka itu peneliti tersebut melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendaur ulang sampah anorganik sebagai kerajinan tangan dan bisa diperjual belikan.

Studi-studi tentang pengelolaan sampah diatas telah memberikan gambaran permasalahan sampah anorganik yang kemudian mendasari peneliti untuk memilih fokus pada satu isu pokok yaitu isu manajemen sampah anorganik di Kota Yogyakarta. Peneliti mengaggap bahwa manajemen sampah menjadi hal penting dalam pengoptimalan pengelolaan sampah terutama sampah anorganik yang diketahui sampah anorganik bisa digunakan kembali dan mendaur ulang sebagai kerajinan yang bisa mendapatkan penghasilan dari menjual kerajinan. Studi-studi tersebut diatas mengidentifikasi bahwa kesadaran dalam memanejemen sampah ada didalam masyarakat. Berangkat dari identifikasi tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Dengan fokus membahas tentang Collaborative Governance dalam Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini akan kolaborasi antara stakeholders Kota Yogyakarta dalam dalam pengelolaan samapah anorganik. Gerakan zero sampah anorganik yang diketahui melakukan pemilahan sampah yang bisa di daur ulang dalam upaya melindungi lingkungan hidup.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk mendukung penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teori merupakan dasar untuk berpikir dan menjelaskan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dua teori yang relevan dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Collaborative Governance

Adanya *Collaborative Governance* yang dibangun atas dasar gagasan bahwa masyarakat mempunyai masukan yang berharga untuk mengambil keputusan (Dupuy & Defacqz, 2022). Menurut Ansell and Gash (2008) “*Collaborative Governance* is a governing arrangement where one or public agencies directly engage non state stakeholders in a collective decisionmaking process that is formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”. (Kolaborasi pemerintah merupakan sebuah tata kelola governance yang melibatkan satu atau lebih agen publik ataupun non publik secara bersama dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang berlangsung secara formal, berorientasi konsensus dan konsultatif bertujuan untuk membuat ataupun mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program ataupun aset publik). Namun menurut Emerson (2012) “*Collaborative Governance* also often involves partnerships between public agencies and may incorporate interagency and intergovernmental partnerships as well”. (*Collaborative Governance* juga sering kali melibatkan kemitraan antar lembaga publik dan juga dapat mencakup kemitraan antar lembaga dan antar pemerintah).

Morse & Stephens (2012) berpendapat bahwa “collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collective action” (collaborative merupakan pendukung pelaksanaan governance yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari berbagai actor sosial yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif dan Kerjasama). *Collaborative Governance* menurut Morse & Stephens (2012) memiliki empat tahapan yaitu: assessment (penilaian), initiation (inisiasi), deliberation (musyawarah), dan implementation (pelaksanaan). Menunjukkan bahwa program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait mengatasi permasalahan sampah sudah terlaksana. Untuk menganalisis proses kolaborasi peneliti menggunakan teori *collaborative governance* oleh Morse & Stephens yang memiliki empat fase dalam *collaborative governance*.

Tabel 1.1 Fase Collaborative Governance

Assessment	Initiation	Deliberation	Implementation
Is collaboration necessary? Are preconditions in place? Who are the stakeholders? Who might fill key roles (sponsor, convener, and facilitator)?	How to frame the issue? How to engage stakeholders? Who/what else is needed? What kind of process?	How to develop effective working group? What ground rules? How to invent options and decide? How to facilitate mutual learning?	Who will do what? How to broaden support? What kind of governance structure? How to monitor progress?

Fase Pertama *collaborative governance* melibatkan *Assessment*. Fase ini berkaitan dengan kondisi awal yang sangat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan kemitraan dan *assessment* apakah collaborative diperlukan dan mungkin dilakukan. Fase ini mencakup :

- a. Pemahaman faktor-faktor kontekstual seperti sejarah kerjasama dan insentif.

- b.** Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
- c.** Kesepakatan umum mengenai masalah tersebut atau adanya tujuan bersama.
- d.** Rasa komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif.

Setelah mengetahui kondisi memerlukan *collaborative* dan potensi keberhasilan *collaborative*, maka adanya proses beralih dari *assessment* ke *Initiation*. Proses *initiation* memerlukan:

- a.** Mengidentifikasi peran penyelenggara dan sponsor, yang mungkin terlibat mengidentifikasi sumber daya.
- b.** Mengumpulkan pemangku kepentingan, mengembangkan kelompok kerja, dan merancang proses.
- c.** *Initiation* memerlukan penekanan untuk mengadakan pertemuan, pengembangan hubungan, dan membangun tim.

Setelah memulai proses dengan kelompok pemangku kepentingan dan mendapatkan komitmen untuk bekerja sama, maka terjadinya *deliberation*. Unsur-unsur *deliberation* antara lain:

- a.** Menetapkan aturan-aturan dasar.
- b.** Pertimbangan dan musyawarah sebagai bagian dari proses bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan.
- c.** Mencapai kesepakatan *collaborative*.

Mengenai *collaborative governance* mengacu pada semacam kelompok yang dikembangkan dalam kemitraan, sebuah gagasan yang sangat di pertimbangkan di fase *deliberation*. Bahwa kelompok *collaborative governance* memerlukan modal sosial, pembelajaran bersama dan negosiasi.

Setelah memutuskan hasil dan strategi, proses *collaborative governance* melanjutkan ke tahap *implementation*. *Implementation* melibatkan berbagai *stakeholders* yang saling mendukung, antara lain:

- a. Merancang struktur tata kelola.
- b. Membangun dukungan konstituen.
- c. Memantau perjanjian, mengevaluasi hasil, dan mengelola kemitraan.

2. Pengelolaan sampah Anorganik

Pengelolaan dapat diartikan management dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan yang berarti menyelenggarakan. manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris “management” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan (Sabri et al., 2022). Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atau usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan atau manajemen ialah kegiatan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan kepentingan atau prioritas sehingga tujuan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Kahfi, 2017). Pengelolaan sampah pada beberapa negara pada umumnya dimulai dari rumah tangga yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan wadah terpisah (biasanya ditandai dengan menggunakan simbol-simbol atau warna tertentu), adapun tempat yang digunakan adalah yang bisa didaur ulang. Adapun di Indonesia, keberadaan konsep ini terlihat dalam Pasal 1 poin 5 Undang-undang No. 18 tahun 2008, lalu dinyatakan kembali melalui Pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik dapat berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang (Harimurti et al., 2020). Sampah anorganik dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah logam, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, dan sampah detergen. Sampah anorganik sebagian besar tidak dapat diuraikan oleh alam secara keseluruhan. Hanya sebagian kecil sampah anorganik yang dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah anorganik yang umum ditemukan di rumah tangga antara lain botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Khoiri & Harsono, 2018).

Cara pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan sampah anorganik dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Prinsip 3R yang diharapkan mampu mejadi cara pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya volume timbulan/timbunan sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Penampungan Akhir). Sebab telah disadari bahwa penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan (Harimurti et al., 2020). Penjelasan dari prinsip 3R dalam pengelolaan sampah anorganik sebagai berikut:

- a. Reduce (mengurangi) dengan **mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah**. Misalnya, kita bisa menggunakan tas belanja kain

sendiri saat berbelanja, membawa botol minum sendiri, dan menghindari penggunaan sedotan plastik.

- b. Reuse (penggunaan kembali), upaya untuk menggunakan kembali barang-barang yang dianggap sampah untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, kertas bekas dapat digunakan kembali sebagai pembungkus, botol plastik bekas dapat digunakan kembali sebagai pot tanaman, dan kardus bekas dapat digunakan kembali sebagai tempat penyimpanan. Reuse dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum dibuang ke tempat sampah.
- c. Reycle (mendaur ulang), Barang bekas dapat diubah menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya, kertas bekas bisa digunakan kerajinan tangan seperti bunga botol bekas dapat diubah menjadi pot tanaman dan tempat pensil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan dan memodifikasi barang bekas dengan kreatif, digunakan seperti fungsinya yang baru.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah anorganik adalah upaya mengelola sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Reycyle) melalui gerakan zero sampah anorganik untuk melakukan pemilahan, penanganan, pengurangan sampah anorganik.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan tentang suatu hal yang diungkapkan dalam kata-kata. Definisi ini membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dapat menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan hal lain. Oleh karena itu, definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan berbagai stakeholders guna berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Stakeholders yang terlibat dapat mencakup dari pihak pemerintahan, swasta ataupun masyarakat sipil.

2. Pengelolaan sampah Anorganik

Pengelolaan sampah anorganik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak terhadap kesehatan, menjaga lingkungan hidup dan agar dapat menangani sampah anorganik, menggunakan prinsip 3R, meliputi Reuse (mengurangi), Reduce (memakai ulang), dan Reycle (daur ulang).

3. Gerakan Zero Sampah Anorganik

Gerakan zero sampah adalah suatu kegiatan di Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengurangi sampah anorganik yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara pengoptimalan pengelolaan sampah, baik dari segi pengurangan sampah ataupun daur ulang sampah yang dihasilkan.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penulis akan mengamati indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman antara penulis dengan pembaca dalam memahami indikator penelitian. Berikut penjelasan mengenai indikator-indikator yang akan digunakan pada penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1	<i>Collaborative Governance</i>	<i>Assessment</i>	Adanya tiga stakeholders (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam melakukan kesepakatan mengenai permasalahan. ➤ Mengidentifikasi adanya tujuan bersama para stakeholders dalam pengelolaan sampah anorganik. ➤ Mengidentifikasi peranan masing-masing para stakeholders dalam pengelolaan sampah anorganik.
		<i>Initiation</i>	Para pemangku kepentingan menginisiasikan program kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah anorganik Kota Yogyakarta.

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi pembagian kerja diantara para stakeholders. ➤ Mengidentifikasi proses inisiasi dalam pengelolaan sampah anorganik.
		<i>Deliberation</i>	Melakukan musyawarah untuk mencapai kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi proses-proses komunikasi antara stakeholders. ➤ Mengidentifikasi proses-proses penetapan aturan-aturan bersama pengelolaan sampah anorganik. ➤ Mengidentifikasi peran Pemerintah dalam memfasilitasi program kerja pengelolaan sampah anorganik.

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
		<i>Implementation</i>	Pelaksanaan dan kesepakatan para stakeholders untuk merancang struktur tata kelola kemitraan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="979 344 1354 674">➤ Mengidentifikasi pelaksanaan startegi bersama dalam pengelolaan sampah anorganik. <li data-bbox="979 709 1354 1039">➤ Mengidentifikasi struktur kelembagaan yang kolaboratif dalam pengelolaan sampah anorganik <li data-bbox="979 1075 1354 1404">➤ Mengidentifikasi kolaborasi para stakholders dalam mengimplementasikan prinsip 3R. <li data-bbox="979 1440 1354 1770">➤ Mengidentifikasi proses pengawasan yang kolaboratif dalam pengelolaan sampah anorganik.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting pada penelitian ini. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan dalam melakukan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data, dan teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta, merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan salah satu model penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kalimat tertulis mau secara lisan dan informan yang didapat saat melakukan survey olah data yang diamati penulis. Dalam model penelitian ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang diperoleh data di lapangan, penelitian menggambarkan kondisi lingkungan secara asli tanpa adanya manipulatif ketika waktu terjun dilapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah melukiskan variable atau kondisi obyek yang diamati secara apa adanya atau tanpa adanya manipulasi. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti secara khusus menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mencapai tujuan dalam membuat deskriptif, gambaran umum, serta sistematis penulisan yang lebih terarah dan terstruktur.

2. Lokasi penelitian

Peneliti melaksanakan penelitiannya di Kota Yogyakarta, tepatnya melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait program Gerakan Zero Sampah Anorganik yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Jumlah bank sampah pada

tahun 2023 ada 568 unit dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 666 unit bank sampah. Peneliti memilih empat bank sampah dari klasifikasi bank sampah pembina dan bank sampah inovatif. Pertama, bank sampah Kantong Rejeki terletak di Cokrodiningratan, Kemantren Jetis. Kedua, bank sampah Bumi Lestari yang terletak di Cokrodiningratan, Kemantren Jetis. Ketiga, bank sampah Berseri 35 berlokasi di Bumijo, Kemantren Jetis. Keempat, bank sampah Surolaras terletak di Kalurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan. Sehingga didalam penelitian ini penulis berusaha menggali informasi bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi dan mengelola sampah anorganik dengan program Gerakan Zero Sampah Anorganik.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah data primer. Adapun data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang menjadi sasaran penelitian. Data primer yang digunakan ini didapatkan dengan mewawancarai dan observasi, dengan bertujuan untuk mendapat data secara akurat dari Pemerintah Kota Yogyakarta, pihak swasta, dan masyarakat. Dengan maksud ini peneliti ingin lebih mendalami bagaimana upaya *Collaborative governance* dalam mendukung gerakan zero sampah anorganik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Dalam Penelitian jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber-sumber seperti buku, jurnal arsip maupun melalui internet yang memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen seperti jurnal yang terkait dengan kegiatan penanggulangan sampah dilingkungan hidup yang dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta, Serta beberapa media online seperti Harianjogja.com, Tribunnews.com, Republika Online, Republika.id, Antarnews.com dan website Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Data yang ingin diambil peneliti upaya Collaborative Governance dalam mendukung gerakan zero sampah anorganik dan manajemen sampah anorganik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara langsung antara 2 orang atau lebih, yaitu penanya atau pewawancara dan narasumber. Wawancara memiliki 3 tahap, tahap pertama ialah pengenalan untuk membangun kedekatan dan saling percaya. Tahap kedua ialah tahap terpenting dalam menanyakan suatu yang ingin digali oleh peneliti. Tahap terakhir ialah adanya respon dari narasumber untuk mendapatkan informasi tambahan ataupun data (Rachmawati, n.d.). Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang narasumber yang diklasifikasikan kedalam tiga bagian. Pertama, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta, yang memiliki kewenang ataupun pemahaman dalam Gerakan Zero

Sampah Anorganik. Kedua, Guwosari Training Center, pihak swasta yang mendaur ulang sampah anorganik. Ketiga, 10 orang narasumber dari berbagai bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Berikut tabel daftar narasumber:

Tabel 1.3 Sasaran Narasumber

No.	Narasumber	Status Narasumber
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Staff Bidang Pengelolaan Persampahan DLH
2.	Guwosari Training Center	Manager Guwosari Training Center
3.	Bank sampah Kantong Rejeki	1 orang pengelola bank sampah Kantong Rejeki
4.	Bank sampah Lestari	1 orang pengelola bank sampah Lestari
5.	Bank sampah Berseri 35	1 orang pengelola bank sampah Berseri 35
6.	Bank sampah Suolaras	1 orang pengelola bank sampah Suolaras

Dalam pengembangan penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi perlunya melakukan perubahan narasumber dalam bagian metode penelitian. Oleh karena itu, penulis memperbarui narasumber yang sebelumnya telah disebutkan dalam metode penelitian awal dengan narasumber baru yang lebih relevan terhadap penelitian ini. Guna mendukung kebutuhan informasi pada topik penelitian ini, penulis merubah jumlah narasumber yang semula 12 menjadi 6 narasumber. Kelompok pertama terdiri dari narasumber dengan kriteria memiliki keahlian dan

memiliki wewenang dalam Gerakan Zero Sampah Anorganik yaitu di Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sementara pada kelompok kedua yaitu pihak swasta Guwosari Training Center. Dan kelompok Ketiga Bank Sampah di Kota Yogyakarta dengan Jumlah 10 narasumber, yang terdiri dari 2 narasumber di 5 bank sampah. Perubahan narasumber yang peneliti lakukan didasarkan oleh suatu alasan. Dengan ini pihak beberapa pihak bank sampah yang awalnya keseluruhan 10 orang dari 5 bank sampah dan diubah menjadi 4 narasumber di setiap bank sampah. Perubahan ini dilakukan karena informasi terkait topik penelitian yang sudah diwakilkan melalui 4 bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa datang ke tempat secara langsung dan melihat lapangan secara langsung kemudian dicatat secara sistematis terkait subyek dan obyek yang telah diamati. Dalam hal ini untuk sistematika penulisan dilakukan melalui pengamatan di lokasi yang dituju. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengobservasi terkait Gerakan sampah anorganik yang terjadi di Kota Yogyakarta dari kesiapan hingga terealisasikan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta. Dalam Pelaksanaan observasi ini, ingin melakukan pengamatan secara langsung dengan waktu pengambilan data. Observasi akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta, 4 bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta, dan pihak swasta yang bekerja sama dalam gerakan zero sampah anorganik. Observasi dilakukan pada tanggal 01 Maret 2024 sampai 30 Mei 2024.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, dan jurnal. Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang dibutuhkan dan melalui dokumen-dokumen serta catatan yang ada. Penelitian ini juga mendapatkan sumber data seperti foto, sumber data, dokumen, atau catatan dari lembaga yang terkait dari obyek yang di wawancarai, sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan masyarakat yang terdampak. Serta dokumentasi yang diambil selama olah data yang telah dilakukan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diujikan. Analisis data yang digunakan ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Kegiatan teknik analisis data yang ada meliputi, pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data yang telah didapatkan waktu olah data di lapangan.

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang dimana penulis memasukan data yang telah didapat berupa narasi atau kalimat diperoleh dari sumber data dan informasi lalu nantinya digabungkan menjadi satu dalam tulisan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian hingga penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis saat dilapangan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data. Disaat pengumpulan data maka terjadi tahapan reduksi sesuatu membuat ringkasan. Reduksi data data yang merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan dan mengarahkan kepada sumber data lalu mengelompokan data sedemikian rupa sampai tahap pembuatan kesimpulan akhir. Reduksi data ini akan berlanjut terus hingga ke tahap laporan akhir tersusun dengan lengkap.

3. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan peneliti untuk menyajikan kumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ialah untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif yang berbentuk narasi sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang ditandai dengan penarikan data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan interpretasi peneliti. Pada tahap penelitian ini mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan selama penelitian ini berlangsung dilapangan.